

Katalog: 4102002.73



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**2023**

Volume 9, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Katalog: 4102002.73

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023**

**Volume 9, 2024**

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023

Volume 9, 2024

Katalog : 4102002.73  
Nomor Publikasi : 73000.24005  
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : xvi+59 halaman

Penyusun Naskah :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pembuat Kover :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi :  
*freepik.com, unsplash.com*

***Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan***

**TIM PENYUSUN**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023**

Volume 9, 2024

**Pengarah**

Aryanto

**Penanggungjawab**

Suri Handayani

**Penyunting**

Wuri Wahyuni

**Pengolah Data, Penulis Naskah, Penata Letak**

Rosyita Darojati A'laa

**Pembuat Kover**

Muhammad Ilham Mubarok



# Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota, disparitas pembangunan dari berbagai aspek dan isu terkait daya beli masyarakat.

Ada tiga pilihan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik. Serta, kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Makassar, Januari 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan



**Aryanto**



# Daftar Isi

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023

Volume 9, 2024

v	: KATA PENGANTAR
vii	: DAFTAR ISI
ix	: DAFTAR TABEL
xi	: DAFTAR GAMBAR
xv	: DAFTAR LAMPIRAN
1	: <b>BAB I PENDAHULUAN</b>
3	: 1.1 Pengukuran Pembangunan Manusia
6	: 1.2 Indikator IPM Metode Baru
9	: 1.3 Penghitungan IPM Metode Baru
9	: 1.4 Klasifikasi Pembangunan Manusia
9	: 1.5 Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia
11	: <b>BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN</b>
13	: 2.1 Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
16	: 2.2 Status IPM Sulawesi Selatan
18	: 2.3 Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
25	: <b>BAB III KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN CAPAIAN DAN TANTANGAN</b>
27	: 3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan
29	: 3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan
29	: 3.3 Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi
31	: <b>BAB IV DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN</b>
33	: 4.1 Disparitas Antarindividu
33	: 4.2 Disparitas Antargender
35	: 4.3 Disparitas Antarwilayah
39	: <b>BAB V DAYA BELI MASYARAKAT</b>
41	: 5.1 Isu Pelemahan Daya Beli
42	: 5.2 Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli
45	: DAFTAR PUSTAKA
49	: LAMPIRAN



# Daftar Tabel

- 8 : Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maximum IPM Metode Baru
- 13 : Tabel 2.1 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2022 dan 2023
- 18 : Tabel 2.2 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2023
- 19 : Tabel 2.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2022 dan 2023
- 41 : Tabel 5.1 Distribusi persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019-Q3 2023

<https://sulsel.bps.go.id>



# Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru
- 8 : Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 9 : Gambar 1.5 Klasifikasi Capaian IPM
- 14 : Gambar 2.1 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 14 : Gambar 2.2 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 15 : Gambar 2.3 Tren Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 16 : Gambar 2.4 Tren Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 16 : Gambar 2.5 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 17 : Gambar 2.6 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2020–2023
- 17 : Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional, 2023
- 19 : Gambar 2.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota terhadap IPM Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 20 : Gambar 2.9 Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 21 : Gambar 2.10 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 21 : Gambar 2.11 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 22 : Gambar 2.12 Pertumbuhan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 27 : Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2020–2023
- 28 : Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 28 : Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 29 : Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus (persen), 2020–2023
- 30 :



# Daftar Gambar

- 33 : Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 34 : Gambar 4.2 Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 34 : Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 35 : Gambar 4.4 IPM Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 36 : Gambar 4.5 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Makassar, Kabupaten Barru, dan Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023
- 36 : Gambar 4.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto (tahun), 2020–2023
- 37 : Gambar 4.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023
- 37 : Gambar 4.8 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, dan Sulawesi Selatan (ribu rupiah), 2020–2023
- 42 : Gambar 5.1 Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga Sulawesi Selatan dan Indonesia *y-on-y* (persen), 2020–Q3 2023
- 42 : Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 43 : Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2022 dan 2023



# Daftar Lampiran

- 47 : Lampiran 1 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) LF SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023
- 48 : Lampiran 2 Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023
- 49 : Lampiran 3 Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023
- 50 : Lampiran 4 Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (ribu rupiah), 2020-2023
- 51 : Lampiran 5 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020-2023
- 52 : Lampiran 6 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2020-2023
- 53 : Lampiran 7 Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Menurut Provinsi, 2020-2023
- 54 : Lampiran 8 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Penduduk Berumur 7-15 Tahun menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2023
- 54 : Lampiran 9 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Penduduk Berumur 16-23 Tahun menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2023
- 55 : Lampiran 10 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Klasifikasi Desa dan Jenjang Pendidikan SD-SMP, 2023
- 55 : Lampiran 11 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Klasifikasi Desa dan Jenjang Pendidikan SMA-Perguruan Tinggi, 2023





# BAB 1

## Pendahuluan

<https://sulsel.bps.go.id>



Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberadaan manusia sebagai pelaku pembangunan tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Oleh karena itulah konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki konsep pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat meliputi: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (BPS, 2017).

### 1.1 Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks

pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



**Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, laporan pembangunan manusia telah dikembangkan, dan yang terakhir penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Adapun metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik

IPM BPS 1996	IPM BPS 2014
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen IPM , UHH, AMH, RLS, Pengeluaran Per Kapita</li> <li>• Metode Agregasi , rata-rata aritmatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen IPM , UHH, HLS, RLS, Pengeluaran Per Kapita</li> <li>• Metode Agregasi , rata-rata geometrik</li> </ul>

**Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Adapun indikator yang berubah, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Perubahan metode penghitungan IPM menghasilkan nilai IPM yang lebih sempurna dibanding IPM metode sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah karena menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

**Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB yang menggantikan PDB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Penambahan komoditas yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan menghasilkan nilai yang lebih baik.

Keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

## 1.2 Indikator IPM Metode Baru

### a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* ( $e_0$ ) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Mulai tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

### b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan lampiran metode baru untuk mengukur dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$FK$  = Faktor Koreksi Pesantren

$E_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t

$i$  = Penduduk usia (a,a+1,...,n)

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata

pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan share sebesar 73,63 persen.



**Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Untuk menghitung nilai dari masing-masing indeks pembentuk IPM, UNDP telah menetapkan batas minimum dan batas maksimum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990, batas diperoleh dari hasil observasi, sedangkan pada tahun 1994 menggunakan suatu nilai batas tertentu. Mulai tahun 2010, penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Batas minimum pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten pada tahun 2010. Angka tersebut merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

### 1.3 Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

### 1.4 Klasifikasi Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk membandingkan antar wilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



**Gambar 1.5 Klasifikasi Capaian IPM**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

### 1.5 Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, dan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

$IPM_t$  = IPM suatu wilayah pada tahun ke t

$IPM_{t-1}$  = IPM suatu wilayah pada tahun ke t-1



# BAB 11

## Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

<https://sulsel.scribd.com>





# BAB II

## Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

### 2.1 Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 74,60. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir hasil long form Sensus Penduduk 2020. Saat ini, umur harapan hidup saat lahir di Sulawesi Selatan mencapai 73,63 tahun dengan kata lain bayi yang baru lahir di tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 73,63 tahun.

Tabel 2.1 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2022 dan 2023

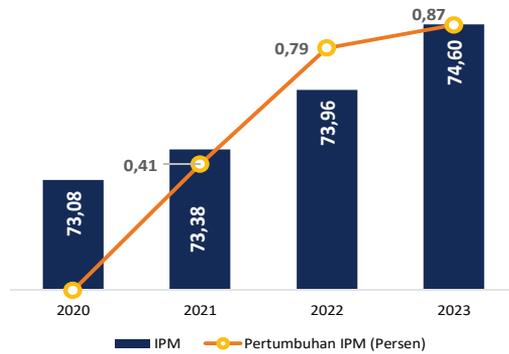
Komponen	2022	2023
Umur Harapan Hidup (tahun)	73,40	73,63
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,63	8,76
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,53	13,54
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun (PPP))	11,430	11,841
Indeks Pembangunan Manusia	73,96	74,60

Sumber : Berita Resmi Statistik

Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah selama 8,76 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Selain itu indikator lainnya dalam dimensi pengetahuan adalah harapan lama sekolah. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,54 tahun kedepan atau setara dengan menyelesaikan pendidikan tinggi hingga diploma I. Dimensi yang ketiga adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita (PPP) yang disesuaikan yang telah mencapai Rp 11,84 juta per kapita per tahun pada tahun 2023.

### Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan membaiknya pembangunan manusia secara umum. Dilihat dari



Sumber :  
Berita Resmi  
Statistik

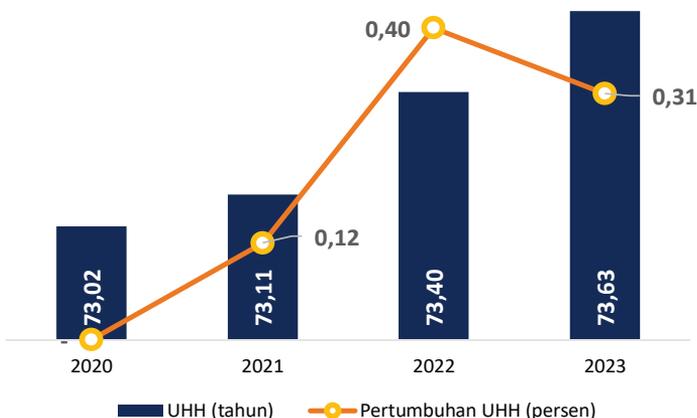
**Gambar 2.1 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2020–2023**

trennya, IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Dalam empat tahun terakhir (2020–2023) mengalami kenaikan sebesar 1,52 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Secara tren pada tahun 2021, IPM tumbuh sebesar 0,41 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian pada 2 tahun berikutnya, laju pertumbuhan IPM juga terlihat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan IPM, maka akan semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan Sulawesi Selatan untuk mencapai level pembangunan manusia yang lebih tinggi

## Dimensi Kesehatan

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sumber data utama dalam perhitungan UHH saat ini adalah hasil Long Form



Sumber :  
Berita Resmi  
Statistik

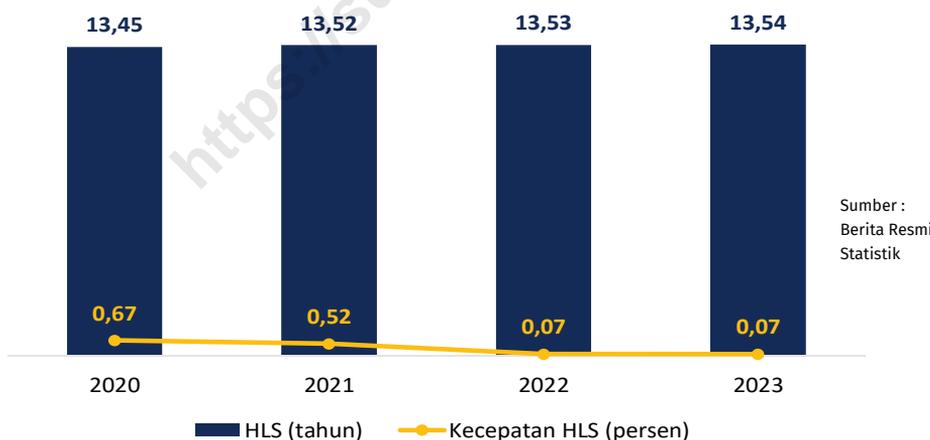
**Gambar 2.2 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2020–2023**

Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2020 – 2023 cenderung stabil pada kisaran 73 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Capaian UHH tahun 2023 sebesar 73,63 tahun, tumbuh sebesar 0,31 persen dibandingkan tahun 2022. walaupun tidak secepat pertumbuhan di tahun 2021 yang mencapai 0,40 persen.

Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru untuk hidup lebih lama semakin tinggi, karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat sehingga angka kematian bayi turut berkurang. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan.

### Dimensi Pendidikan

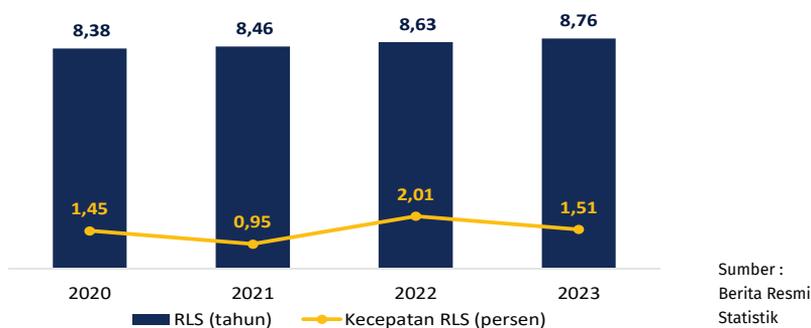
Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung lamanya pendidikan yang ditempuh dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini di Sulawesi Selatan



**Gambar 2.3 Tren Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2020–2023**

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

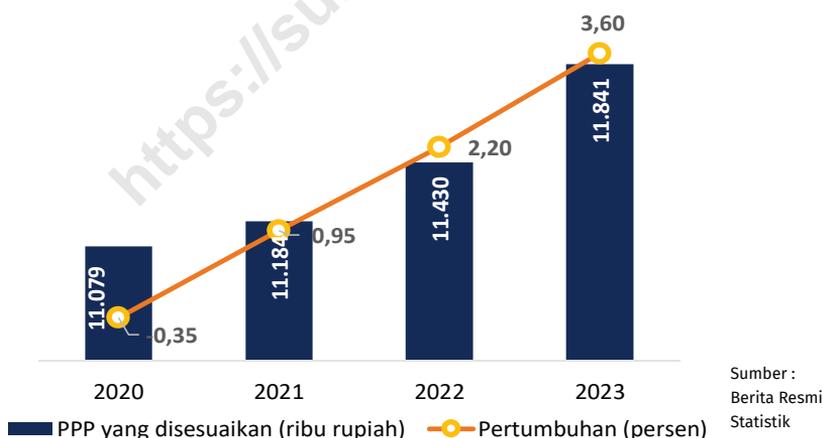
Pada periode tahun 2020–2023, tren Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022 dan 2023, HLS tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2020. Sedangkan hal yang serupa terjadi pada rata-rata lama sekolah yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 1,51 persen.



**Gambar 2.4 Tren Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2020–2023**

## Standar Hidup Layak

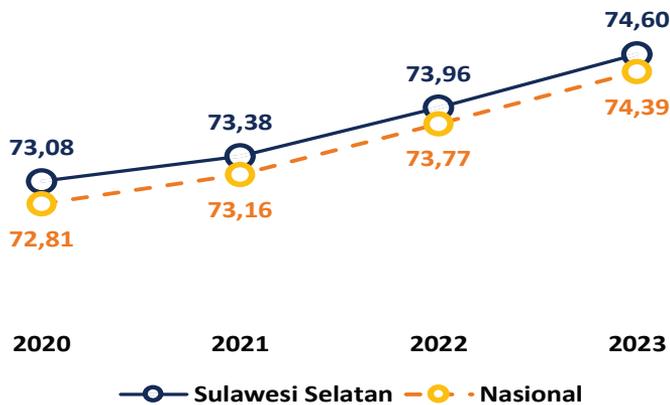
Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2020–2023 mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,35 persen. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 3,60 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat sebesar Rp 762.000 dari yang sebelumnya Rp 11,08 juta (2020) menjadi Rp 11,84 juta perkapita per tahun di tahun 2023



**Gambar 2.5 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2020–2023**

## 2.2 Status IPM Sulawesi Selatan

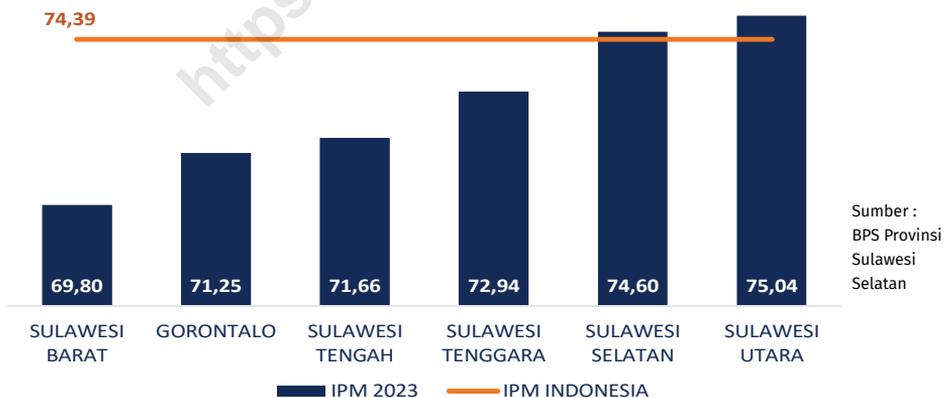
Hasil perhitungan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 74,60 berada pada level pembangunan manusia kategori “tinggi” bersama 26 provinsi lainnya. level ini masih sama dengan tahun sebelumnya dengan nilai IPM pada tahun 2022 sebesar 73,96. Selama 4 tahun terakhir ini pembangunan manusia Sulawesi Selatan secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Tren capaian yang positif juga ditunjukkan dengan posisi angka IPM Sulawesi Selatan yang berada diatas angka IPM Nasional.



Sumber :  
Berita Resmi  
Statistik

**Gambar 2.6 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2020–2023**

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi. Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Capaian IPM Sulawesi Utara di tahun 2023 sebesar 75,04, lebih tinggi 0,44 poin dibandingkan IPM Sulawesi Selatan. Apabila dibandingkan dengan IPM Sulawesi Barat terlihat adanya perbedaannya yang cukup besar yaitu 5,24 poin lebih tinggi. Status pembangunan manusia di Pulau Sulawesi juga masih timpang, terdapat 1 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “sedang” sementara 5 provinsi lainnya sudah berstatus “tinggi”.



Sumber :  
BPS Provinsi  
Sulawesi  
Selatan

**Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sulawesi dan Nasional, 2023**

Perbedaan capaian IPM di pulau Sulawesi disebabkan oleh perbedaan capaian masing-masing komponen pembentuknya. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terdapat beberapa komponen seperti Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan yang lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.2 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2023**

Provinsi	UHH LF SP2020 (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04
Sulawesi Tengah	70,66	13,33	8,96	10.149	71,66
Sulawesi Selatan	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60
Sulawesi Tenggara	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94
Gorontalo	70,50	13,16	8,10	11.069	71,25
Sulawesi Barat	70,76	12,88	8,13	9.718	69,80
<b>Indonesia</b>	<b>73,93</b>	<b>13,15</b>	<b>8,77</b>	<b>11.899</b>	<b>74,90</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik

Rata-rata umur harapan hidup di Pulau Sulawesi sebesar 71,87 tahun. Selisih umur harapan hidup tertinggi dan terendah sebesar 3,35 tahun yang berarti umur harapan hidup bayi yang lahir di tahun 2023 di provinsi Sulawesi Utara lebih lama 3,35 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir di Provinsi Gorontalo.

Pada bidang pendidikan rata-rata harapan lama sekolah penduduk di Pulau Sulawesi sebesar 13,26 tahun. Penduduk usia 7 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi tenggara diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan selama 13,70 tahun atau setara dengan Diploma I, merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi diantara lima provinsi lain di Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo juga mempunyai HLS setara dengan Diploma I. Adapun HLS di Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat sebesar 12,88 hingga 12,96 tahun atau setara dengan menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA sederajat.

Rata-rata lama sekolah tahun 2023 pada penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas, atau mereka yang lahir sebelum tahun 1999 sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2-3 SMP sederajat. Hal ini belum mencapai target wajib belajar 9 tahun yang pernah digalakkan pemerintah. Capaian dimensi standar hidup layak yang diukur dari besarnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan paling tinggi ada di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan yang paling rendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan selisih sebesar Rp. 2,12 Juta Perkapita per tahun.

### 2.3 Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, IPM tertinggi untuk level kabupaten/kota masih dicapai oleh Kota Makassar sebesar 84,85, kemudian disusul oleh Kota Palopo (80,77) dan

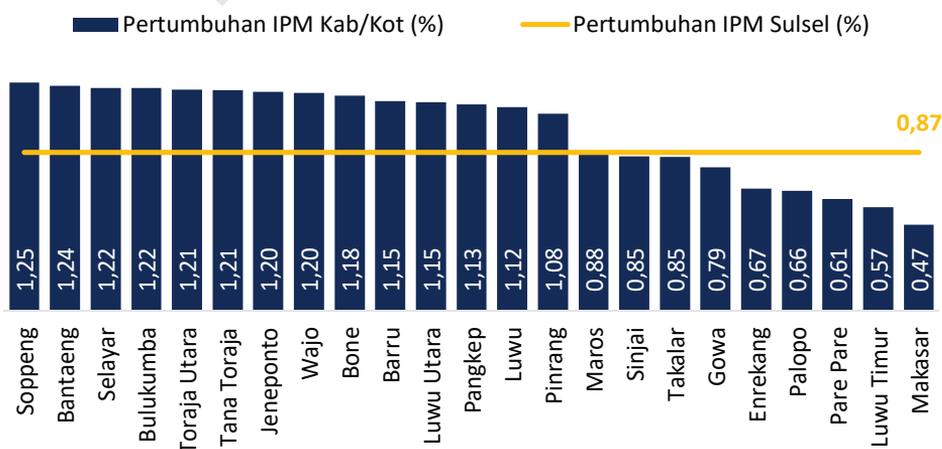
Kota Parepare (80,36). Tiga wilayah kotamadya di Sulawesi Selatan ini menunjukkan capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten lainnya. Selama periode tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Bone mengalami perubahan status

**Tabel 2.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2022 dan 2023**

Tahun	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2022	Jeneponto, Bone	Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Pangkep, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Soppeng, Wajo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Pare-pare	Makassar, Palopo
2023	Jeneponto	Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Pangkep, Maros, Barru, Bone, Sidrap, Pinrang, Soppeng, Wajo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Pare-pare	Makassar, Palopo

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

dari pembangunan IPM sedang ke tinggi. Sebagian besar status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi, sebanyak 20 Kabupaten, sedangkan yang berstatus sedang ada kabupaten Jeneponto, dan 3 Kotamadya berstatus IPM sangat tinggi , termasuk Kota Parepare yang sebelumnya masih berstatus tinggi di tahun 2022.



**Gambar 2.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota terhadap IPM Sulawesi Selatan (persen), 2023**

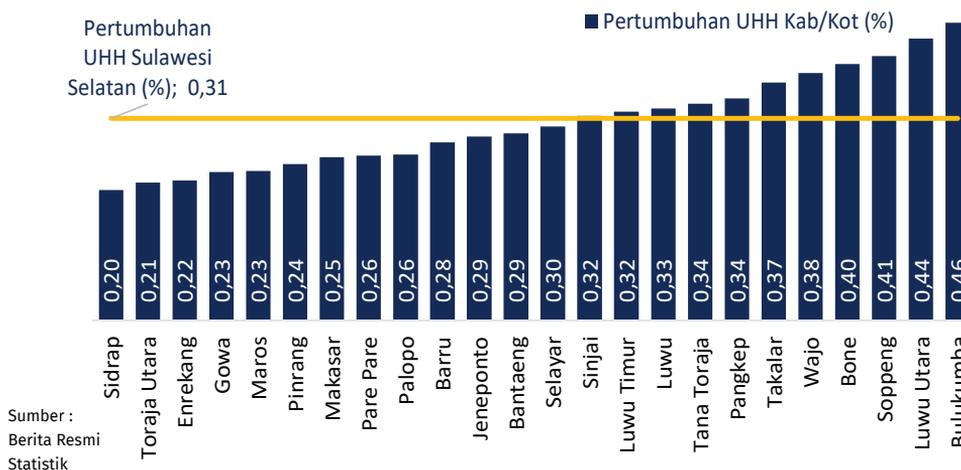
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2022 dan 2023, Kabupaten Soppeng memiliki

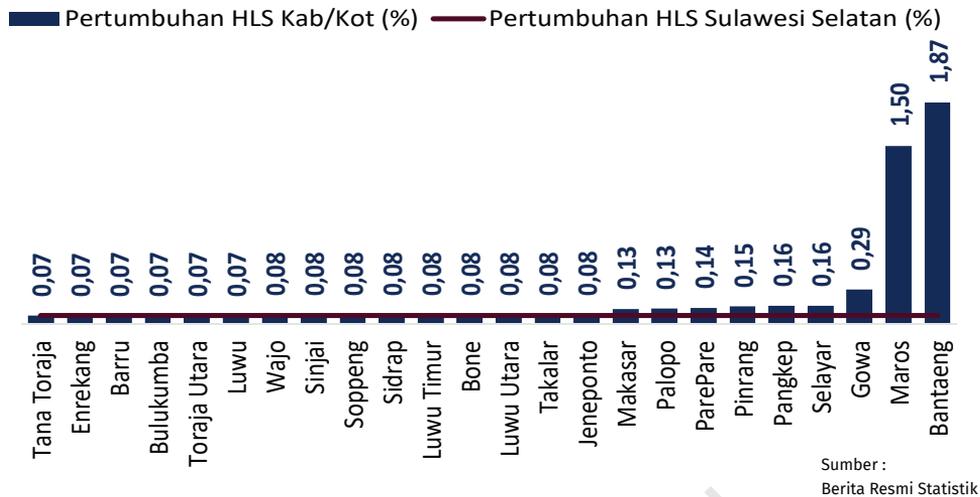
pertumbuhan IPM paling cepat sebesar 1,25 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 1,24 persen, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukmba masing-masing sebesar 1,22 persen. Secara keseluruhan ada 15 kabupaten yang pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2022 dan 2023, Kabupaten Soppeng memiliki pertumbuhan IPM paling cepat sebesar 1,25 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 1,24 persen, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukmba masing-masing sebesar 1,22 persen. Secara keseluruhan ada 15 kabupaten yang pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah dengan pertumbuhan IPM terendah terdapat di Kota Makassar, Kab. Luwu Timur, dan Kota Pare-pare dengan pertumbuhan pada kisaran 0,47 hingga 0,61 persen.

### Capaian Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Umur Harapan Hidup Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2021. Terdapat 14 kabupaten yang mampu mencapai pertumbuhan UHH yang setara maupun lebih tinggi dari pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan. Salah satunya yang paling tinggi adalah Kabupaten Bulukumba yang tumbuh sebesar 0,60 persen yang berarti harapan hidup bayi baru lahir di Bulukumba meningkat 0,41 tahun di tahun 2022 menjadi 68,51 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kecepatan pertumbuhan paling rendah justru terjadi di Kabupaten Toraja Utara, meskipun mempunyai angka UHH tertinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2022, pertumbuhan UHH Toraja Utara hanya sebesar 0,33 persen atau meningkat 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

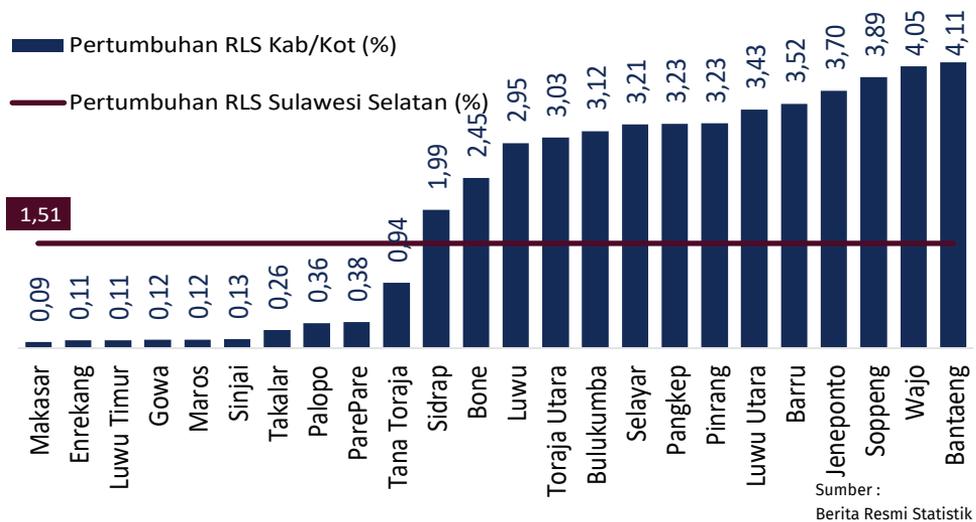


**Gambar 2.9** Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023



**Gambar 2.10 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2023**

Dimensi pengetahuan Sulawesi Selatan di tahun 2023 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya, Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2023 tumbuh sebesar 0,07 persen. Hanya terdapat 2 kabupaten yang pertumbuhan HLS nya lebih dari 1 persen dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng (1,87 persen) dan Maros (1,50 persen). HLS paling tinggi dicapai oleh Kota Makassar dan yang paling rendah ada di Kabupaten Jeneponto dengan perbedaan keduanya sebesar 3,49 tahun. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Makassar diharapkan dapat bersekolah selama 15,61 tahun setara menyelesaikan Diploma 3, sedangkan penduduk 7 tahun ke atas



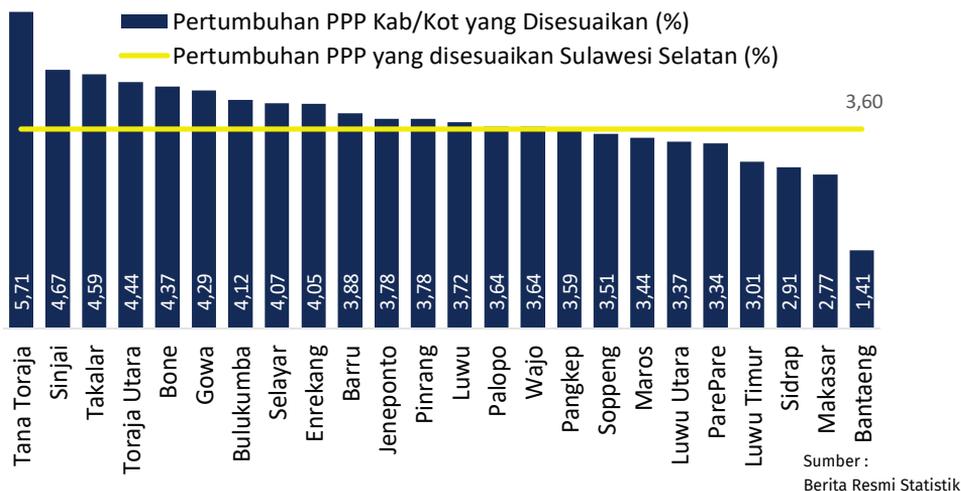
**Gambar 2.11 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023**

di Jeneponto diharapkan dapat bersekolah selama 12,12 tahun atau hanya setara dengan lulus SMA sederajat.

Komponen lain dari dimensi pengetahuan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Pada tahun 2023 RLS Sulawesi Selatan sebesar 8,76 tahun, tumbuh 1,51 persen dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,76 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas VIII. Pertumbuhan RLS tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 4,11 persen. RLS di 14 Kabupaten lainnya juga tumbuh tinggi lebih dari 1 persen di tahun 2023. Sedangkan pertumbuhan RLS paling rendah terjadi di Kota Makassar yang hanya sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2023 adalah Kota Makassar sebesar 11,56 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 tahun yaitu Kota Palopo (11,13) dan Kota Pare-pare (10,70). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas XI. Sedangkan RLS terendah pada tahun 2023 adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 7,00 tahun yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP kelas VII.



**Gambar 2.12** Pertumbuhan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2023

Dimensi standar hidup layak ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). PPP Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp.11,43 juta (PPP per kapita per tahun) atau tumbuh sebesar 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya pengeluaran 1 penduduk di Sulawesi Selatan selama satu tahun penuh adalah sebesar Rp 11,08 Juta pada tahun 2022. Kabupaten dengan pertumbuhan PPP paling tinggi adalah Toraja Utara sebesar 4,43 persen, disusul oleh Selayar sebesar 4,26 persen. Adapun pertumbuhan PPP yang terendah adalah Kabupaten Pinrang sebesar 1,22 persen.

Terdapat 10 kabupaten/kota yang capaian PPP tahun 2022 lebih tinggi dari PPP Sulawesi Selatan. PPP tertinggi ada di Kota Makassar sebesar 17,41 juta per kapita per tahun dengan pertumbuhan 1,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. PPP di Kota Makassar 2,3 kali lebih besar daripada PPP di Tana Toraja yang sebesar Rp 7,5 Juta sekaligus paling rendah diantara 24 Kabupaten/ Kota lainnya.



# BAB III

## Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

<https://sulsel.scribd.com>



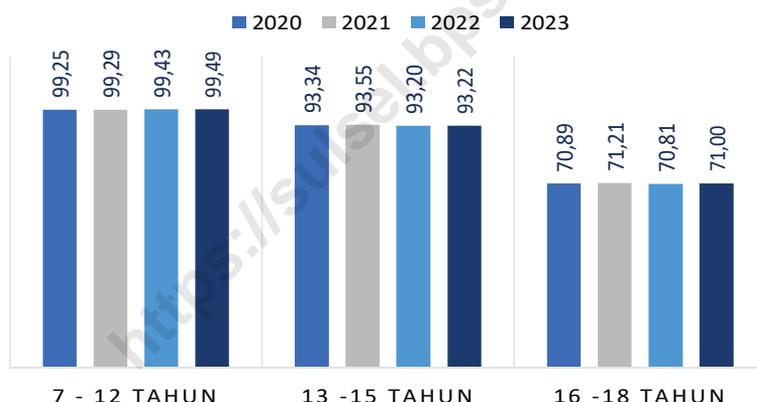


# BAB III

## Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

### 3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Pemerataan terhadap akses pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Serta digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.



**Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2020-2023**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2023

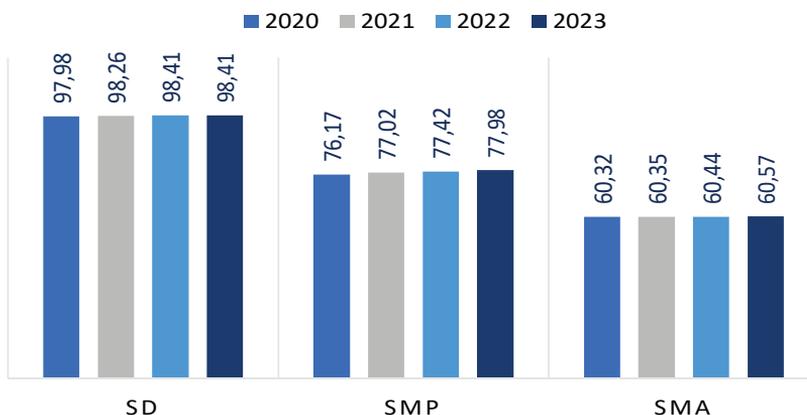
APS usia 7 – 12 tahun (setara SD/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 99,43 persen yang artinya 99,43 persen dari penduduk yang berusia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sedang bersekolah. Semakin tinggi angka APS maka akan meningkatkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat. APS 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

APS usia 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 93,20 persen lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13 – 15 tahun mengalami penurunan sebesar 0,35 poin, hal ini disebabkan penurunan partisipasi sekolah di daerah perkotaan sebesar 1,22 persen. APS usia 16 – 18 tahun (setara SMA/

sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 70,81 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7 – 12 tahun dan APS usia 13 – 15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16 – 18 tahun ini juga mengalami penurunan sebesar 0,40 poin akibat dari penurunan partisipasi sekolah laki-laki maupun perempuan sebesar 1,05 persen di daerah perkotaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7 – 12 tahun (SD/ sederajat) di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 98,41 persen meningkat 0,15 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan 98 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sudah bersekolah tepat waktu pada jenjang SD sederajat. Selanjutnya, APM usia 13 – 15 tahun (SMP/ sederajat) pada tahun 2022 mencapai 77,42 persen. Capaian ini jauh lebih rendah daripada APM SD. Masih terdapat sekitar 22,58 persen anak usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP. Begitu pula dengan capaian APM SMA tahun masih berada pada kisaran 60,44 persen atau terdapat sekitar 39,56 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA sederajat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar hingga 12 tahun dapat dirasakan oleh semua masyarakat.



**Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2020–2023**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2023

### 3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Pada tahun 2022 capaian UHH Sulawesi Selatan sebesar 70,97 tahun. Meningkatkan 0,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Berdasarkan hasil olah Susenas diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian UHH Sulawesi Selatan yaitu usia hamil pada perkawinan pertama dan penolong kelahiran/tempat melahirkan. Kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik pada periode 2022. Persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 95,44 persen pada tahun 2021, meningkat sebesar 0,89 poin pada tahun 2022 (96,33 persen). Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah dan lainnya pada tahun 2022 sebesar 4,56 persen, menurun 0,89 poin pada tahun 2022 (3,67 persen). Hampir seluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 100 persen pada tahun 2022, kecuali Takalar dan Pinrang.

### 3.3 Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi



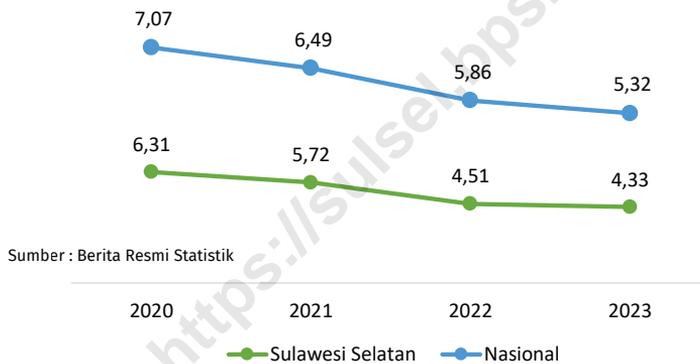
**Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan, 2020–2023**

Sumber :Berita Resmi Statistik

Berdasarkan hasil olah Susenas Maret 2020 – Maret 2023 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi baik dari jumlah maupun persentase. Dalam 4 tahun terakhir persentase penduduk miskin mengalami penurunan paling rendah pada September 2021 menjadi sebesar 8,53 persen. Namun pada

Maret 2022 persentase penduduk miskin kembali naik sebesar 8,63 persen atau sebanyak 777,44 ribu jiwa. Hingga pada periode Maret 2023 persentase penduduk miskin masih meningkat menjadi 8,70 persen atau sebanyak 788,85 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin perkotaan Maret 2023 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat 2,86 kali lipat atau sekitar 5,51 ribu lebih banyak daripada peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 juga menurun dibandingkan 4 tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional, tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai 2023, sudah lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Penurunan tingkat pengangguran tahun 2023 tidak sebanyak 2 tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai -0,59 persen (tahun 2021) dan -1,21 persen (tahun 2022). Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sebesar -0,18 persen, sedangkan secara nasional berkurang -0,54 persen.



**Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus (Persen), 2020–2023**

# BAB IV

## Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

<https://sulsel.bps.go.id>



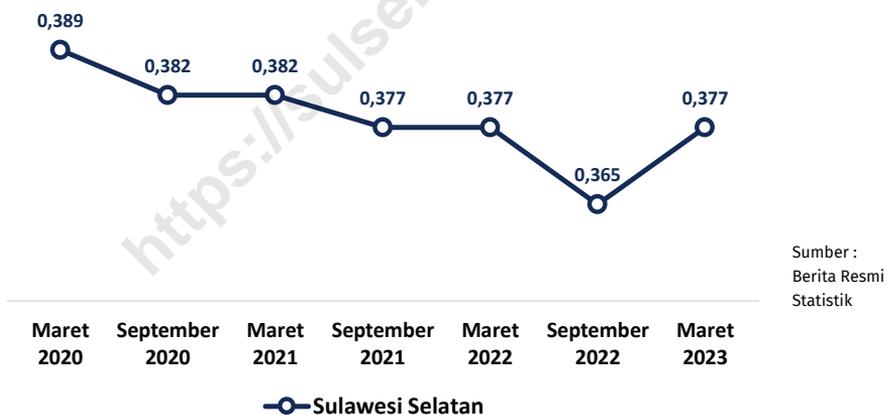


# BAB IV

## Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

### 4.1 Disparitas Antarindividu

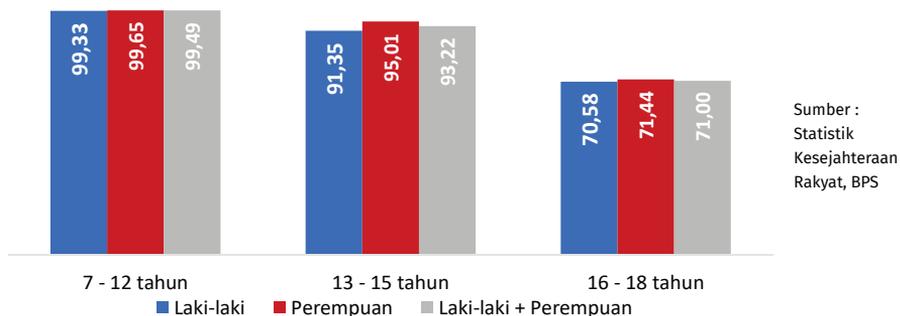
Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi antar individu tidak dapat dihindari. Manusia adalah fokus utama dalam pembangunan manusia. Individu harus dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya. Gini rasio pengeluaran di Sulawesi Selatan menunjukkan ketimpangan yang terjadi dari sisi ekonomi. Gini rasio di Sulawesi Selatan kondisi Maret 2023 mencapai 0,377, turun jika dibandingkan dengan Maret 2020. Namun hal ini masih menunjukkan ketimpangan antar individu yang masih melebar dan termasuk dalam ketimpangan kategori sedang.



Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan, 2020–2023

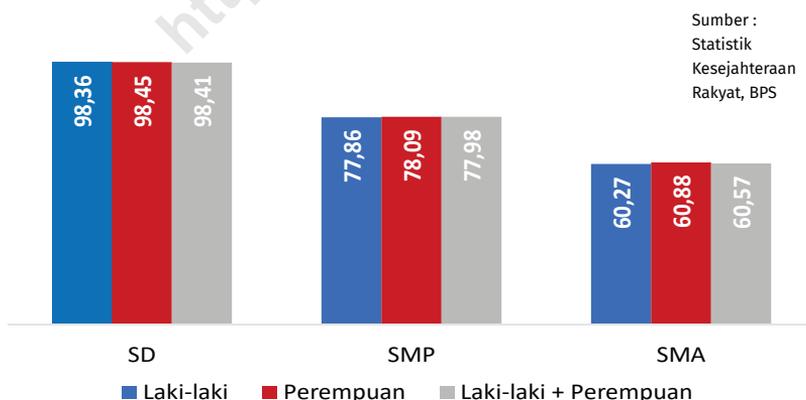
### 4.2 Disparitas Antargender

Kondisi yang ideal yang diharapkan dalam pembangunan manusia adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Ketimpangan gender dari sisi pendidikan masih terjadi saat ini. Beberapa indikator pendidikan telah mencatat capaian perempuan telah melampaui laki-laki diantaranya angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).



**Gambar 4.2 Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023**

Pada tahun 2023 APS penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada seluruh tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Perbedaan paling besar terjadi pada partisipasi sekolah di tingkat SMP yang memiliki selisih sebesar 3,37 persen. Hal serupa terjadi pada angka partisipasi murni tahun 2023 yang menunjukkan capaian perempuan lebih sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Adapun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 mencatat bahwa TPAK laki-laki sebesar 82,22 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 49,62 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar (-0,69) persen poin dan 1,04 (-0,85) persen poin.



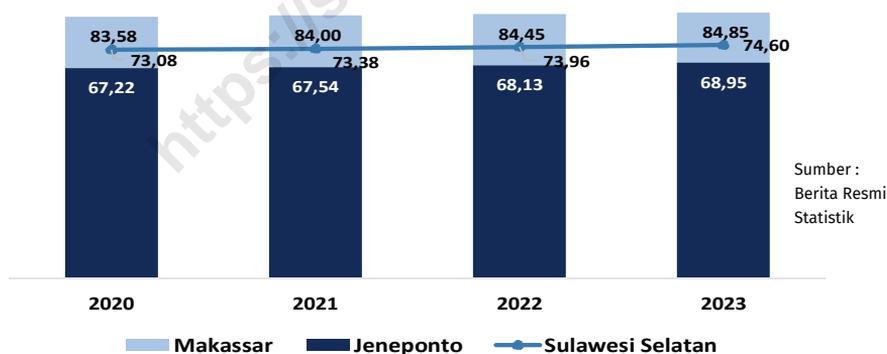
**Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023**

### 4.3 Disparitas Antawilayah

Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Ditandai dengan status pembangunan manusia yang berbeda. Ada daerah yang masih berstatus sedang sedangkan yang lain sudah berstatus tinggi bahkan 3 kotamadya di Sulawesi Selatan telah berstatus sangat tinggi. Kondisi wilayah, sosial, dan budaya yang berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan manusia.

#### Disparitas antar Kabupaten/Kota.

Disparitas antar kabupaten/kota terlihat dari capaian IPM Kota Makassar (IPM = 84,85) dengan Kabupaten Jeneponto (IPM = 68,95) pada tahun 2023. Selisih capaian IPM kedua kabupaten dan kota tersebut mencapai 15,90 poin. Kesenjangan pembangunan manusia di Jeneponto juga tampak dari selisih sebesar 5,65 poin dengan capaian IPM Sulawesi Selatan. Penyebab kesenjangan paling tinggi antara Kota Makassar dengan Kabupaten Jeneponto terdapat pada komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Kota Makassar yang 1,83 kali lebih tinggi dari Jeneponto. Selanjutnya rata-rata lama sekolah di Jeneponto juga 1,65 kali lebih rendah dibandingkan Kota Makassar.

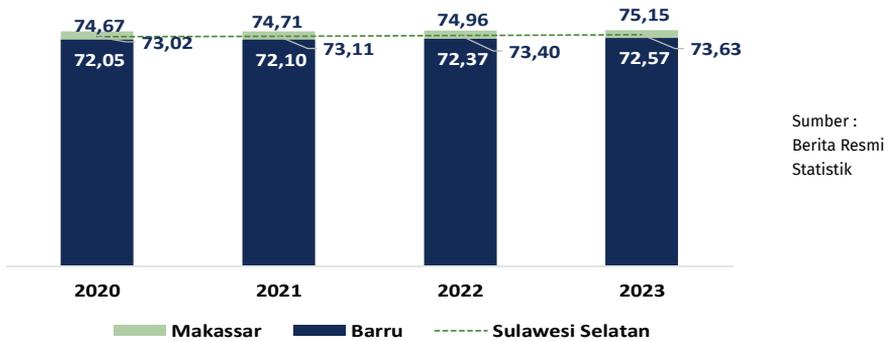


Gambar 4.4 IPM Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan Sulawesi Selatan, 2020–2023

Jika diperhatikan trennya, selama tahun 2020 hingga 2023, perbedaan IPM kedua wilayah tersebut sempat meningkat di tahun 2021 namun kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten/kota tidak semakin melebar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat menurut dimensi penyusun IPM, pada dimensi kesehatan, capaian UHH tertinggi pada tahun 2023 adalah Kota Makassar (75,15 tahun) dan terendah adalah Kabupaten Barru (72,57 tahun). Selisih antara kedua wilayah ini mencapai 2,58. Kecepatan pertumbuhan UHH antar kabupaten/kota di Sulsel

juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan berada dalam rentang 0,20-0,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**Gambar 4.5 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Makassar, Kabupaten Barru, dan Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023**

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kabupaten/kota. Pada komponen harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) capaian tertinggi pada tahun 2023 adalah Kota Makassar dan terendah Kabupaten Jeneponto. Selama periode tahun 2020 hingga 2023 tren menunjukkan kesenjangan yang makin turun pada kedua indikator tersebut, dari yang semula selisih 3,59 tahun (HLS) dan 4,56 tahun (RLS) di tahun 2020 menjadi 3,49 tahun (HLS) dan 4,56 tahun (RLS) di tahun 2023. Selain itu kesenjangan antara RLS maupun HLS Jeneponto dengan Sulawesi Selatan yang tampak lebih kecil dibandingkan Kota Makassar menunjukkan sebagian besar daerah lainnya di Sulawesi Selatan memiliki kondisi RLS dan HLS yang tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Jeneponto.



**Gambar 4.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023**



**Gambar 4.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, dan Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023**

Pada dimensi ekonomi, yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga masih menunjukkan adanya disparitas antar kabupaten/kota. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2023 tertinggi adalah Kota Makassar dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja. Selama periode tahun 2020 hingga 2023, disparitas pada dimensi ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja cenderung semakin melebar. Pengeluaran di Kota Makassar lebih besar 2,23 kali lipat dibandingkan pengeluaran di Tana Toraja, serta 1,5 kali lebih besar dibandingkan pengeluaran Sulawesi Selatan secara umuma Makassar dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, disparitas pada dimensi ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja cenderung semakin melebar. Diperlukan upaya-upaya yang tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tana Toraja.



**Gambar 4.8 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, dan Sulawesi Selatan (ribu rupiah), 2020–2023**





# BAB V

## Daya Beli Masyarakat

<https://sulsel.bps.go.id>



# BAB V

## Daya Beli Masyarakat

### 5.1 Isu Pelemahan Daya Beli

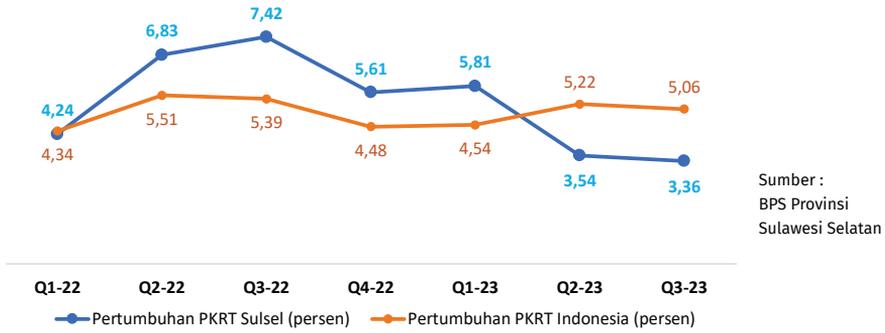
Memasuki tahun ke-4 setelah pandemi Covid 19 sejak pertama kali melanda di tahun 2020, perekonomian Sulawesi Selatan secara umum kembali tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen dengan proporsi paling besar dalam ekonomi yang dihitung dari sisi pengeluaran. Dari tabel 5.1 terlihat bahwa peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Sulawesi Selatan selalu lebih dari 50 persen. Daya beli masyarakat yang meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dibanding komponen PDRB lainnya. Kabar baiknya persentase proporsi konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan dan beralih pada peningkatan proporsi PMTB yang mengindikasikan investasi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan.

**Tabel 5.1 Distribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2020–Q3 2023**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
Konsumsi rumah tangga	55,27	53,38	53,02	55,22	54,05	51,37
Konsumsi LNPRT	1,57	1,47	1,50	1,59	1,61	1,52
Konsumsi Pemerintah	9,66	9,44	8,43	4,85	8,50	8,11
PMTB	39,45	38,69	37,11	36,07	35,45	37,43
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor	9,51	10,14	13,15	12,43	10,38	10,58
Impor	15,59	13,19	13,50	10,40	10,15	9,14
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kemampuan konsumsi masyarakat berkaitan dengan daya beli yang dipengaruhi berbagai fenomena ekonomi sepanjang tahun 2023. Berdasarkan rilis Inflasi Desember 2023 diperoleh informasi bahwa Pertamina beberapa kali telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menyesuaikan harga internasional. Tercatat, harga BBM nonsubsidi tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2022. Selain itu terdapat kenaikan tarif cukai rokok sejak 1 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191 tahun 2022 dengan rata-rata 10 persen. Pemerintah melalui Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-rate sebanyak 2 kali di tahun ini dalam rangka penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

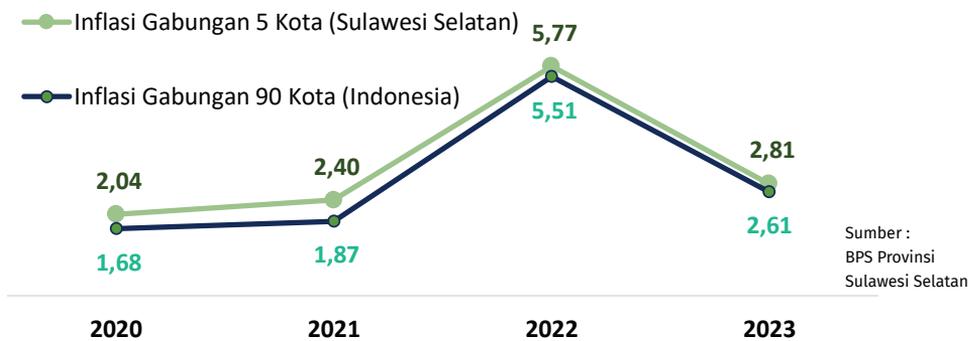


**Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sulawesi Selatan dan Indonesia y-on-y (persen), 2020-Q3 2023**

Jika dicermati lebih lanjut untuk kondisi triwulanan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2022 dan 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada triwulan I 2023, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 5,81 persen, lebih cepat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2022. Kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan di triwulan berikutnya sebesar 3,54 persen. Kondisi terakhir di triwulan 3 tahun 2023 konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif namun lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

## 5.2 Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli

Keynes (1936) dalam Analisis Isu Terkini (BPS, 2017) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Kondisi daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Daya beli masyarakat yang berpenghasilan



**Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2020-2023**

tetap dan tidak mampu, akan menurun apabila harga – harga barang terus naik di pasaran. Oleh sebab itu, inflasi dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Gambar 5.2 menunjukkan tren laju inflasi gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2023. Laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah sebesar 2,81 persen, lebih tinggi daripada laju inflasi nasional. Hal ini menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2023 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,81 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,77 persen, kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa tingkat kestabilan harga tahun 2023 lebih baik dibanding dengan tahun 2022, dan menunjukkan penurunan harga yang cukup signifikan.



**Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan (persen), 2022 dan 2023**

Angka inflasi bulanan dari gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang tahun 2023 Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan deflasi sebanyak 3 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2023 sebesar 0,75 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan Juli 2023 sebesar 0,06 persen. Penyebab utama kenaikan inflasi pada bulan Maret adalah naiknya harga pada hampir semua kelompok pengeluaran, 3 yang paling tinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,12 persen, transportasi sebesar 0,41 persen, dan penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,31 persen. Di sisi lain, deflasi terdalam pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari 2023 sebesar -0,22 persen. Penyebab utama terjadinya deflasi adalah turunnya harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,11 persen.

Berdasarkan hasil gambaran indikator pengukuran daya beli masyarakat (pengeluaran konsumsi rumah tangga) dan faktor yang diduga mempengaruhi daya beli masyarakat (laju inflasi) memberikan gambaran efek yang searah yang

artinya bahwa pertumbuhan PKRT yang melambat selama tahun 2023 dan inflasi tahunan juga lebih rendah di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara Inflasi bulanan berfluktuasi dan cenderung meningkat di beberapa bulan tertentu terutama pada periode awal dan akhir tahun. Keselasaran antara pertumbuhann PKRT dengan inflasi yang meningkat menunjukkan masih adanya permintaan/konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan pada periode tersebut yang mana haraga-harga barang sedang tinggi.

<https://sulsel.bps.go.id>

# Daftar Pustaka

<https://sulsel.bps.go.id>



# Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2024. "Berita Resmi Statistik." BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Januari 2. Diakses Januari 20, 2024. <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2024/01/02/785/desember-2023--inflasi-year-on-year--yoy--gabungan-lima-kota-ihk-di-sulawesi-selatan-sebesar-2-81-persen.html>.
- , 2023. "Berita Resmi Statistik." BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Desember 1. Diakses Januari 16, 2024. <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2023/12/01/765/indeks-pembangunan-manusia--ipm--sulawesi-selatan-pada-tahun-2023-mencapai-74-60--meningkat-0-64-poin--0-87-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--73-96-.html>.
- , 2023. "Berita Resmi Statistik." BPS Provinsi Sulawesi Selatan. November 6. Diakses Januari 20, 2024. <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/759/agustus-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sulawesi-selatan-sebesar-4-33-persen.html>.
- , 2023. "Berita Resmi Statistik." BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Juli 17. Diakses Januari 20, 2024. <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/732/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-377.html>.
- , 2023. "Berita Resmi Statistik." BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Juli 17. Diakses Januari 20, 2024. <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/731/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-naik-menjadi--8-70-persen.html>.
- , 2024. "Berita Resmi Statistik." Badan Pusat Statistik. Januari 2. Diakses januari 15, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/02/2299/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-desember-2023-sebesar-2-61-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-sumenep-sebesar-5-08-persen-.html>.
- , 2023. STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Statistik, Subdirektorat Analisis. 2016. Indeks Pemabngunan Manusia 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



# Lampiran

<https://sulsel.bps.go.id>





## Lampiran 1

Tren Umur Harapan Hidup (UHH) LF SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023

Kode	Prov/Kab/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH)			
		2020	2021	2022	2023
7301	Selayar	72,71	72,77	73,05	73,27
7302	Bulukumba	73,06	73,25	73,67	74,01
7303	Bantaeng	72,15	72,20	72,46	72,67
7304	Jeneponto	73,11	73,23	73,60	73,81
7305	Takalar	72,69	72,81	73,16	73,43
7306	Gowa	73,61	73,63	73,86	74,03
7307	Sinjai	72,22	72,30	72,60	72,83
7308	Maros	73,13	73,15	73,38	73,55
7309	Pangkajene Kepulauan	72,12	72,25	72,62	72,87
7310	Barru	72,05	72,10	72,37	72,57
7311	Bone	72,39	72,54	72,91	73,20
7312	Soppeng	72,61	72,78	73,17	73,47
7313	Wajo	72,49	72,62	72,97	73,25
7314	Sidenreng Rappang	73,83	74,00	74,17	74,32
7315	Pinrang	73,94	74,09	74,29	74,47
7316	Enrekang	73,52	73,53	73,76	73,92
7317	Luwu	72,66	72,76	73,06	73,30
7318	Tana Toraja	73,99	74,08	74,38	74,63
7322	Luwu Utara	72,74	72,89	73,24	73,56
7325	Luwu Timur	73,68	73,78	74,08	74,32
7326	Toraja Utara	74,49	74,50	74,72	74,88
7371	Kota Makassar	74,67	74,71	74,96	75,15
7372	Kota ParePare	73,97	74,01	74,25	74,44
7373	Kota Palopo	73,53	73,57	73,81	74,00
<b>7300</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>73,02</b>	<b>73,11</b>	<b>73,40</b>	<b>73,63</b>

## Lampiran 2

Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023

Kode	Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)			
		2020	2021	2022	2023
7301	Selayar	12,65	12,66	12,67	12,69
7302	Bulukumba	13,17	13,41	13,42	13,43
7303	Bantaeng	12,04	12,05	12,30	12,53
7304	Jeneponto	11,98	12,10	12,11	12,12
7305	Takalar	12,41	12,42	12,48	12,49
7306	Gowa	13,64	13,65	13,66	13,70
7307	Sinjai	13,05	13,06	13,25	13,26
7308	Maros	13,04	13,16	13,30	13,50
7309	Pangkajene Kepulauan	12,76	12,77	12,78	12,80
7310	Barru	13,58	13,59	13,61	13,62
7311	Bone	12,88	12,98	12,99	13,00
7312	Soppeng	12,90	13,05	13,20	13,21
7313	Wajo	13,14	13,15	13,30	13,31
7314	Sidenreng Rappang	12,94	12,95	13,01	13,02
7315	Pinrang	13,23	13,24	13,25	13,27
7316	Enrekang	13,70	13,71	13,86	13,87
7317	Luwu	13,33	13,39	13,40	13,41
7318	Tana Toraja	13,80	13,86	13,87	13,88
7322	Luwu Utara	12,43	12,57	12,58	12,59
7325	Luwu Timur	12,83	12,84	13,00	13,01
7326	Toraja Utara	13,38	13,39	13,41	13,42
7371	Kota Makassar	15,57	15,58	15,59	15,61
7372	Kota ParePare	14,50	14,51	14,52	14,54
7373	Kota Palopo	15,08	15,09	15,10	15,12
<b>7300</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>13,45</b>	<b>13,52</b>	<b>13,53</b>	<b>13,54</b>

## Lampiran 3

Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun), 2020-2023

Kode	Prov/Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			
		2020	2021	2022	2023
7301	Selayar	7,88	8,08	8,09	8,35
7302	Bulukumba	7,67	7,82	8,01	8,26
7303	Bantaeng	6,72	6,77	6,81	7,09
7304	Jeneponto	6,59	6,60	6,75	7,00
7305	Takalar	7,29	7,49	7,64	7,66
7306	Gowa	8,19	8,20	8,40	8,41
7307	Sinjai	7,75	7,78	7,79	7,80
7308	Maros	7,73	8,01	8,02	8,03
7309	Pangkajene Kepulauan	7,66	7,92	8,05	8,31
7310	Barru	8,23	8,24	8,25	8,54
7311	Bone	7,15	7,23	7,36	7,54
7312	Soppeng	7,81	7,82	7,96	8,27
7313	Wajo	6,81	7,05	7,16	7,45
7314	Sidenreng Rappang	7,84	7,94	8,04	8,20
7315	Pinrang	7,86	7,87	8,04	8,30
7316	Enrekang	8,90	8,91	8,93	8,94
7317	Luwu	8,24	8,35	8,48	8,73
7318	Tana Toraja	8,26	8,51	8,52	8,60
7322	Luwu Utara	7,79	7,86	7,87	8,14
7325	Luwu Timur	8,80	8,81	8,92	8,93
7326	Toraja Utara	7,96	8,25	8,26	8,51
7371	Kota Makassar	11,21	11,43	11,55	11,56
7372	Kota ParePare	10,45	10,65	10,66	10,70
7373	Kota Palopo	10,76	10,94	11,09	11,13
<b>7300</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>8,38</b>	<b>8,46</b>	<b>8,63</b>	<b>8,76</b>

## Lampiran 4

Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2023

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun)			
		2020	2021	2022	2023
7301	Selayar	8.970	9.060	9.446	9.830
7302	Bulukumba	10.513	10.632	10.941	11.392
7303	Bantaeng	11.632	11.829	12.133	12.304
7304	Jeneponto	9.114	9.215	9.425	9.781
7305	Takalar	10.454	10.543	10.746	11.239
7306	Gowa	9.394	9.504	9.812	10.233
7307	Sinjai	9.439	9.505	9.726	10.180
7308	Maros	10.963	11.032	11.403	11.795
7309	Pangkajene Kepulauan	11.405	11.519	11.817	12.241
7310	Barru	10.923	11.017	11.275	11.712
7311	Bone	8.963	9.030	9.277	9.682
7312	Soppeng	9.483	9.558	9.756	10.098
7313	Wajo	12.386	12.505	12.729	13.192
7314	Sidenreng Rappang	12.073	12.201	12.379	12.739
7315	Pinrang	11.844	11.956	12.102	12.559
7316	Enrekang	10.844	10.973	11.183	11.636
7317	Luwu	10.014	10.116	10.308	10.691
7318	Tana Toraja	7.217	7.434	7.584	8.017
7322	Luwu Utara	11.562	11.736	12.105	12.513
7325	Luwu Timur	12.814	12.886	13.058	13.451
7326	Toraja Utara	8.097	8.134	8.494	8.871
7371	Kota Makasar	16.873	17.097	17.406	17.889
7372	Kota ParePare	13.663	13.786	14.027	14.495
7373	Kota Palopo	12.995	13.117	13.404	13.892
<b>7300</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>11.079</b>	<b>11.184</b>	<b>11.430</b>	<b>11.841</b>

## Lampiran 5

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2023

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM			
		2020	2021	2022	2023
7301	Selayar	69,29	69,68	70,27	71,13
7302	Bulukumba	71,37	72,02	72,75	73,64
7303	Bantaeng	69,45	69,71	70,41	71,28
7304	Jeneponto	67,22	67,54	68,13	68,95
7305	Takalar	69,84	70,25	70,86	71,46
7306	Gowa	71,58	71,74	72,44	73,01
7307	Sinjai	69,86	70,02	70,60	71,20
7308	Maros	71,77	72,32	72,92	73,56
7309	Pangkajene Kepulauan	71,31	71,81	72,41	73,23
7310	Barru	72,43	72,56	72,96	73,80
7311	Bone	68,46	68,81	69,43	70,25
7312	Soppeng	70,01	70,33	71,05	71,94
7313	Wajo	71,57	72,05	72,69	73,56
7314	Sidenreng Rappang	73,07	73,39	73,81	74,38
7315	Pinrang	73,27	73,46	73,90	74,70
7316	Enrekang	73,98	74,13	74,61	75,11
7317	Luwu	71,58	71,92	72,42	73,23
7318	Tana Toraja	69,05	69,78	70,16	71,01
7322	Luwu Utara	71,53	71,99	72,48	73,31
7325	Luwu Timur	74,71	74,83	75,41	75,84
7326	Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69
7371	Kota Makasar	83,58	84,00	84,45	84,85
7372	Kota ParePare	79,20	79,56	79,87	80,36
7373	Kota Palopo	79,39	79,72	80,24	80,77
<b>7300</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>73,08</b>	<b>73,38</b>	<b>73,96</b>	<b>74,60</b>

## Lampiran 6

### Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2020–2023

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	2023
Aceh	73.29	73.48	74.11	74.70
Sumatera Utara	73.62	73.84	74.51	75.13
Sumatera Barat	74.29	74.56	75.16	75.64
Riau	73.67	73.89	74.45	74.95
Jambi	72.29	72.62	73.11	73.73
Sumatera Selatan	71.62	71.83	72.48	73.18
Bengkulu	72.93	73.16	73.68	74.30
Lampung	71.04	71.25	71.79	72.48
Kep. Bangka Belitung	72.74	72.96	73.50	74.09
Kepulauan Riau	77.69	77.87	78.48	79.08
DKI Jakarta	81.92	82.25	82.77	83.55
Jawa Barat	72.61	72.96	73.63	74.24
Jawa Tengah	71.88	72.17	72.80	73.39
DI Yogyakarta	79.95	80.22	80.65	81.09
Jawa Timur	73.04	73.48	74.05	74.65
Banten	74.41	74.68	75.25	75.77
Bali	76.52	76.69	77.40	78.01
Nusa Tenggara Barat	70.46	70.86	71.65	72.37
Nusa Tenggara Timur	66.93	67.02	67.63	68.40
Kalimantan Barat	68.76	68.99	69.71	70.47
Kalimantan Tengah	72.62	72.81	73.17	73.73
Kalimantan Selatan	73.09	73.45	74.00	74.66
Kalimantan Timur	75.94	76.60	77.36	78.20
Kalimantan Utara	71.00	71.57	72.21	72.88
Sulawesi Utara	73.67	74.03	74.52	75.04
Sulawesi Tengah	70.31	70.54	71.01	71.66
Sulawesi Selatan	73.08	73.38	73.96	74.60
Sulawesi Tenggara	71.61	71.82	72.38	72.94
Gorontalo	69.51	69.82	70.62	71.25
Sulawesi Barat	68.40	68.64	69.19	69.80
Maluku	71.34	71.55	72.04	72.75
Maluku Utara	69.30	69.56	70.26	70.98
Papua Barat	65.94	66.11	66.72	67.47
Papua	61.22	61.40	62.16	63.01
<b>Indonesia</b>	<b>72.81</b>	<b>73.16</b>	<b>73.77</b>	<b>74.39</b>

## Lampiran 7

Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPP) Menurut Provinsi, 2022 dan 2023

Provinsi	UHH		HLS		RLS		PPP	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aceh	72,92	73,06	14,37	14,38	9,44	9,55	9.963	10.334
Sumatera Utara	73,39	73,67	13,31	13,48	9,71	9,82	10.848	11.049
Sumatera Barat	73,88	74,14	14,10	14,11	9,18	9,28	1.113	1.138
Riau	73,95	74,18	13,29	13,30	9,22	9,32	11.158	11.448
Jambi	73,61	73,84	13,05	13,13	8,68	8,81	10.871	1.116
Sumatera Selatan	73,76	74,04	12,55	12,63	8,37	8,50	11.109	11.472
Bengkulu	72,90	73,11	13,68	13,74	8,91	9,03	1.084	11.172
Lampung	73,95	74,17	12,74	12,77	8,18	8,29	10.336	10.769
Kep. Bangka Belitung	73,68	73,90	12,18	12,31	8,11	8,25	13.358	13.589
Kepulauan Riau	74,62	74,90	12,99	13,05	10,37	10,41	14.469	14.998
DKI Jakarta	75,54	75,81	13,08	13,33	11,31	11,45	18.927	19.373
Jawa Barat	74,65	74,91	12,62	12,68	8,78	8,83	11.277	11.695
Jawa Tengah	74,58	74,69	12,81	12,85	7,93	8,01	11.377	11.835
DI Yogyakarta	75,11	75,18	15,65	15,66	9,75	9,83	14.482	14.924
Jawa Timur	74,57	74,87	13,37	13,38	8,03	8,11	11.992	12.421
Banten	74,46	74,77	13,05	13,09	9,13	9,15	12.216	12.601
Bali	74,60	74,88	13,48	13,58	9,39	9,45	13.942	14.382
Nusa Tenggara Barat	71,66	72,02	13,96	13,97	7,61	7,74	10.681	11.095
Nusa Tenggara Timur	71,30	71,57	13,21	13,22	7,70	7,82	7.877	8.248
Kalimantan Barat	73,47	73,71	12,66	12,67	7,59	7,71	9.355	981
Kalimantan Tengah	73,34	73,54	12,75	12,76	8,65	8,73	11.458	11.878
Kalimantan Selatan	73,70	73,97	12,82	12,86	8,46	8,55	12.469	12.953
Kalimantan Timur	74,45	74,72	13,84	14,02	9,92	9,99	12.641	13.202
Kalimantan Utara	73,51	73,54	13,06	13,20	9,27	9,34	935	9.734
Sulawesi Utara	73,59	73,85	12,95	12,96	9,68	9,77	11.179	11.497
Sulawesi Tengah	70,49	70,66	13,32	13,33	8,89	8,96	9.696	10.149
Sulawesi Selatan	73,40	73,63	13,53	13,54	8,63	8,76	1.143	11.841
Sulawesi Tenggara	71,70	71,79	13,69	13,70	9,25	9,31	9.708	10.117
Gorontalo	70,22	70,50	13,12	13,16	8,02	8,10	10.687	11.069
Sulawesi Barat	70,42	70,76	12,87	12,88	8,08	8,13	9.358	9.718
Maluku	70,16	70,45	14,00	14,08	10,19	10,20	8.876	9.278
Maluku Utara	70,47	70,76	13,73	13,74	9,24	9,26	8.398	8.834
Papua Barat	68,23	68,51	13,21	13,34	7,84	7,93	8.101	8.404
Papua	67,98	68,17	11,14	11,15	7,02	7,15	7.146	7.562
<b>Indonesia</b>	<b>73,70</b>	<b>73,93</b>	<b>13,10</b>	<b>13,15</b>	<b>8,69</b>	<b>8,77</b>	<b>11.479</b>	<b>11.899</b>

## Lampiran 8

### Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Penduduk Berumur 7-15 Tahun menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	7-12 tahun					13-15 tahun				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%		Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Perkotaan</b>										
Laki-Laki	99,31	0,47	0,00	98,39	100,00	91,99	2,15	0,02	87,77	96,21
Perempuan	99,66	0,27	0,00	99,13	100,00	96,98	0,83	0,01	95,35	98,60
Laki-Laki+Perempuan	99,48	0,27	0,27	98,95	100,00	94,54	1,13	1,20	92,32	96,77
<b>Perdesaan</b>										
Laki-Laki	99,34	0,20	0,00	98,94	99,73	90,79	1,23	0,01	88,38	93,20
Perempuan	99,65	0,16	0,00	99,34	99,95	93,27	1,05	0,01	91,21	95,33
Laki-Laki+Perempuan	99,49	0,13	0,13	99,24	99,74	92,06	0,81	0,88	90,48	93,64
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>										
Laki-Laki	99,33	0,24	0,00	98,86	99,79	91,35	1,20	0,01	89,00	93,70
Perempuan	99,65	0,15	0,00	99,36	99,95	95,01	0,69	0,01	93,66	96,35
Laki-Laki+Perempuan	99,49	0,14	0,14	99,21	99,77	93,22	0,68	0,73	91,88	94,55

## Lampiran 9

### Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Penduduk Berumur 16-23 Tahun menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik Characteristics	16-18 tahun					19-23 tahun				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%		Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Perkotaan</b>										
Laki-Laki	76,15	3,00	0,04	70,27	82,02	47,46	2,89	0,06	41,79	53,13
Perempuan	73,33	3,29	0,04	66,88	79,78	46,37	2,74	0,06	41,00	51,74
Laki-Laki+Perempuan	74,73	2,14	2,87	70,53	78,94	46,92	2,08	4,43	42,84	50,99
<b>Perdesaan</b>										
Laki-Laki	65,18	2,07	0,03	61,11	69,24	22,73	1,54	0,07	19,70	25,75
Perempuan	69,44	2,13	0,03	65,26	73,63	33,20	1,87	0,06	29,54	36,86
Laki-Laki+Perempuan	67,23	1,51	2,24	64,27	70,19	27,91	1,24	4,45	25,48	30,35
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>										
Laki-Laki	70,58	1,80	0,03	67,05	74,12	35,65	1,80	0,05	32,13	39,18
Perempuan	71,44	1,97	0,03	67,57	75,31	40,15	1,71	0,04	36,80	43,50
Laki-Laki+Perempuan	71,00	1,30	1,83	68,45	73,55	37,89	1,28	3,39	35,38	40,41

Catatan :

<sup>1</sup>Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

<sup>2</sup>Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

## Lampiran 10

### Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Klasifikasi Desa dan Jenjang Pendidikan SD-SMP, 2023

Karakteristik	SD					SMP				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%		Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Perkotaan</b>										
Laki-Laki	98,31	0,58	0,01	97,18	99,44	80,93	2,80	0,03	75,44	86,43
Perempuan	98,97	0,44	0,00	98,10	99,83	80,08	2,39	0,03	75,40	84,77
Laki-Laki+Perempuan	98,64	0,36	0,37	97,93	99,35	80,50	1,78	2,21	77,01	83,99
<b>Perdesaan</b>										
Laki-Laki	98,40	0,32	0,00	97,78	99,02	75,16	1,81	0,02	71,60	78,71
Perempuan	98,02	0,39	0,00	97,25	98,79	76,34	1,69	0,02	73,03	79,66
Laki-Laki+Perempuan	98,22	0,25	0,25	97,73	98,71	75,76	1,23	1,63	73,34	78,18
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>										
Laki-Laki	98,36	0,31	0,00	97,75	98,97	77,86	1,63	0,02	74,66	81,05
Perempuan	98,45	0,29	0,00	97,88	99,03	78,09	1,44	0,02	75,28	80,91
Laki-Laki+Perempuan	98,41	0,21	0,22	97,99	98,82	77,98	1,06	1,36	75,90	80,06

## Lampiran 11

### Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Klasifikasi Desa dan Jenjang Pendidikan SMA-Perguruan Tinggi, 2023

Karakteristik	SMA					Perguruan Tinggi				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%		Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Perkotaan</b>										
Laki-Laki	66,04	3,20	0,05	59,76	72,32	39,77	2,84	0,07	34,21	45,34
Perempuan	61,54	3,47	0,06	54,74	68,33	37,91	2,73	0,07	32,55	43,27
Laki-Laki+Perempuan	63,78	2,40	3,76	59,08	68,48	38,84	2,08	5,35	34,77	42,92
<b>Perdesaan</b>										
Laki-Laki	54,67	2,23	0,04	50,29	59,05	16,55	1,37	0,08	13,87	19,23
Perempuan	60,19	2,22	0,04	55,83	64,56	25,69	1,69	0,07	22,37	29,00
Laki-Laki+Perempuan	57,33	1,60	2,79	54,20	60,47	21,07	1,11	5,28	18,89	23,26
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>										
Laki-Laki	60,27	1,94	0,03	56,48	64,07	28,69	1,73	0,06	25,29	32,08
Perempuan	60,88	2,08	0,03	56,80	64,96	32,14	1,66	0,05	28,88	35,40
Laki-Laki+Perempuan	60,57	1,43	2,37	57,76	63,38	30,41	1,26	4,13	27,94	32,87

Catatan :

<sup>1</sup>Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati

<sup>2</sup>Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret





**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125  
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125  
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>  
E-mail: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)